

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perdagangan internasional yang lebih terstruktur dan transparan diatur dalam *World Trade Organization* (WTO) didirikan pada tahun 1995, bertujuan untuk mengatur, memfasilitasi perdagangan antarnegara, dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. WTO berperan besar dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan di perjanjian perdagangan dunia. Dokumen berperan memastikan kelancaran arus barang dan kepatuhan regulasi perdagangan internasional. Regulasi seperti *Trade Facilitation Agreement* (TFA), bertujuan mempercepat proses perdagangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. TFA *Section II*, Pasal I – XII 2024 berfokus pada proses pengeluaran barang dan peningkatan transparansi dalam proses bea cukai dan mengurangi biaya perdagangan.

World Customs Organization (WCO) menyatakan bahwa efektivitas prosedur operasional kepabeanan sangat mempengaruhi pergerakan barang lintas batas. Oleh karena itu, kepabeanan perlu merevisi prosedur operasional untuk mengoptimalkan fasilitas dan pengawasan perdagangan. Penundaan yang berlebihan menjadi tantangan serius bagi dunia usaha, terutama karena koordinasi yang buruk antara bea cukai dan lembaga pemerintah lainnya. Barang sering diperiksa lebih dari tiga kali, menyebabkan pengiriman tertunda dan menambah biaya, yang akhirnya memengaruhi daya saing perdagangan (Chinnapareddy dan Zemedede, 2019).

Landasan bagi pengelolaan dan pengawasan barang impor di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bahwa pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor dan ekspor. Regulasi ini bertujuan untuk melancarkan kelancaran arus barang guna tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 mengatur mengenai prosedur dan ketentuan terkait pengeluaran barang impor yang akan digunakan di dalam negeri, bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada para pelaku usaha mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengeluaran barang setelah melalui proses pabean.

Barang impor yang telah dinyatakan bebas bea masuk atau setelah bea masuk dapat dikeluarkan untuk digunakan, dengan syarat seluruh dokumen kepabeanan yang relevan, seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB), dan bukti pembayaran telah diselesaikan sesuai aturan, jika terdapat ketidaksesuaian dokumen atau informasi, proses pengeluaran barang dapat tertunda dan berisiko dikenakan sanksi administratif. Perusahaan pelaku impor memastikan semua dokumen dan informasi barang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari kendala di proses Bea dan Cukai. DJBC adalah Lembaga pemerintah yang berperan mengawasi lalu lintas barang masuk dari daerah pabean, berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan sektor kepabeanan dan cukai, serta penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (Imam & Murdiati, 2020).

Impor tidak hanya meningkatkan tekanan persaingan di pasar lokal, perusahaan menjadi lebih efisien, tetapi juga dapat memengaruhi kinerja dengan memperluas ketersediaan perantara asing. Perantara yang di impor memfasilitasi upaya perusahaan untuk meningkatkan portofolio dan memenuhi persyaratan pembeli asing, sehingga meningkatkan permintaan di pasar luar negeri. Pemerintah memberi izin kepada pelaku usaha untuk melakukan aktivitas yang mendukung perkembangan bisnis. Salah satunya adalah aktivitas impor, di mana barang-barang diimpor dari luar negeri karena kebutuhan akan barang atau layanan. Kegiatan impor memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara dan dapat mendorong perkembangan industri lokal. Negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemasukan negara melalui perdagangan internasional (Niko, 2020).

Kinerja logistik merupakan kunci utama dalam mendukung pertumbuhan perdagangan serta menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan kinerja logistik internasional telah mendorong peningkatan perdagangan impor dan ekspor. Namun, permasalahan dalam pengeluaran barang impor menjadi tantangan utama dalam strategi peningkatan produksi perusahaan. Dengan volume barang impor yang terus meningkat, jalur distribusi yang tidak efisien dapat menyebabkan terhambatnya proses pengeluaran, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap operasional dan produktivitas perusahaan. Penetapan jalur merah yang tepat menjadi krusial untuk memastikan kelancaran pengeluaran barang, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara optimal tanpa mengganggu jadwal produksi yang ditetapkan (Wang et al., 2024).

Ketidakjelasan dalam proses pengeluaran barang, sering mengakibatkan terhambatnya barang di daerah pabean, gudang, maupun pelabuhan. Maka, dalam penanganan dokumen impor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kelengkapan dan keakuratan dokumen - dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses penanganan dokumen Pemberitahuan Inpor Barang (PIB) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Dalam proses penanganan dokumen, hasil akhirnya adalah ketika dokumen tersebut sudah menerima respon penjaluran. Respon penjaluran tersebut terdiri dari SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah) dan SPJH (Surat Pemberitahuan Jalur Hijau). Berikut adalah Data Peningkatan Pengeluaran Barang Impor PT Apparel One Indonesia Kota Semarang

Tabel 1.1 Data Pengeluaran Barang Impor tahun 2020 – 2024
PT Apparel One Indonesia

Pengeluaran Barang Impor PT Apparel One Indonesia 2020-2024			
Tahun	Data Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
2020	19263	3852,60	14,01%
2021	17909	3581,80	13,03%
2022	31915	6383,00	23,22%
2023	31907	6381,40	23,21%
2024	36468	7293,60	26,54%

Sumber : PT Apparel One Indonesia Semarang, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah data pengeluaran barang impor PT Apparel One Indonesia Semarang pada tahun 2020 – 2024 terjadi peningkatan signifikan dari 19.263 pada tahun 2020 dan dalam periode 2024 sudah mencapai 36.468 data. Peningkatan volume dokumen ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas perdagangan internasional perusahaan yang semakin tinggi. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah dokumen impor, frekuensi terjadinya kesalahan dalam dokumen juga mengalami peningkatan. Tingginya

volume dan kompleksitas dokumen menuntut ketelitian yang lebih besar dalam proses administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Kesalahan dalam dokumen impor dapat menimbulkan hambatan serius, seperti penumpukan barang di pelabuhan dan keterlambatan proses pengeluaran barang. Kondisi ini pada akhirnya mengganggu alur distribusi ke bagian produksi dan berpotensi mengacaukan jadwal operasional perusahaan. Salah satu konsekuensi dari kesalahan dokumen adalah penetapan jalur merah oleh pihak bea cukai, yang mewajibkan pemeriksaan fisik dan administratif yang lebih ketat. Prosedur ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses impor, menimbulkan dampak negatif terhadap efisiensi distribusi dan produksi, serta meningkatkan biaya operasional perusahaan.

Terhambatnya proses pengeluaran barang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, namun juga berpengaruh pada rantai pasok secara keseluruhan. Dengan kondisi seperti ini, prinsip kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi diperlukan dalam pengurusan dokumen untuk memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi agar barang impor tidak masuk ke dalam jalur pemeriksaan kepabeanan yang beresiko tinggi. Dalam konsep bea cukai, jalur pemeriksaan kepabeanan yang beresiko tinggi adalah jalur merah (*red line*). Apabila barang masuk ke jalur *red line*, maka bea cukai melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap dokumen dan fisik barang, memastikan tidak ada pelanggaran peraturan, serta penilaian terhadap nilai dan klasifikasi barang. Setiap kesalahan kecil dalam memengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya peran administrasi dalam menjaga kelancaran proses impor.

Prosedur penanganan pengeluaran barang impor di PT Apparel One Indonesia mengalami beberapa kendala administratif. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah meningkatnya frekuensi kesalahan dalam pengelolaan dokumen impor, seperti keterlambatan pengiriman dokumen asli dari tim marketing untuk kebutuhan proses kepabeanan, tidak tercapainya *Lead Time* yang ditentukan, sistem kepabeanan yang kadang mengalami masalah, kesalahan input dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), ketidaksesuaian antara jumlah barang yang tertera (*Quantity*) dan barang yang diterima (*Actual*), kesalahan dalam penggunaan *HS Code*, serta ketidaksesuaian antara Surat Jalan (SJ) dengan dokumen impor yang akan menyebabkan pengeluaran barang terhambat.

Proses pengeluaran barang impor yang tidak efisien dapat menimbulkan berbagai kendala serius, meliputi keterlambatan distribusi barang dan tertundanya proses produksi. Selain itu, tingginya volume barang yang masuk tanpa diimbangi dengan manajemen dokumen yang optimal turut memperbesar potensi masuknya barang ke jalur merah, yang berdampak pada waktu dan biaya pengeluaran barang. Peneliti menganggap penting untuk menjelaskan serta menjabarkan efesiensi pengeluaran dan pemasukan barang impor. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dalam meningkatkan efesiensi proses pengeluaran serta kendala apa saja dalam penanganan impor, maka penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **"OPTIMALISASI PROSES DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELUARAN BARANG IMPOR DI PT APPAREL ONE INDONESIA SEMARANG"**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi sebagai pengarah tujuan dan fondasi penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa pertanyaan disusun untuk mempermudah penelitian dan pembahasan masalah. Pertanyaan penelitian pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana Optimalisasi Proses Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Barang Impor di PT Apparel One Indonesia Semarang?
2. Apa saja faktor kendala dalam Optimalisasi Proses Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Barang Impor di PT Apparel One Indonesia Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan apa yang diperkenankan peneliti peroleh dan capai dari penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan pembaca serta memahami lebih dalam apa yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Optimalisasi Proses Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Barang Impor di PT Apparel One Indonesia Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor kendala Optimalisasi Proses Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Barang Impor di PT Apparel One Indonesia Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian Tugas Akhir diharapkan memiliki manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumber informasi yang berguna, khususnya untuk pihak-pihak berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan teori-teori perkuliahan ke dalam praktik dunia nyata. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ekspor Impor.

2. Bagi Program Studi

Melalui Tugas Akhir ini dapat memberikan tambahan referensi dan informasi yang disediakan bagi akademis lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait optimalisasi PIB dalam meningkatkan efisiensi proses pengeluaran barang impor, serta sebagai persyaratan kelulusan Program Studi D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi perusahaan dalam menyempurnakan kebijakan dan pelayanan yang berhubungan dengan proses penetapan jalur merah guna kelancaran pengeluaran barang impor, mencegah terjadinya kesalahan pada proses impor barang, serta masukan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.